



SALAM

Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 8 No. 6 (2021), pp.1723-1734

DOI: 10.15408/sjsbs.v8i6.23311

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>



Rekonstruksi Dakwah Islam di Ranah Politik dan Kultural*

Abdullah Hakam Shah¹, Rizqi Maulida Amalia²

Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Jakarta



[10.15408/sjsbs.v8i6.23311](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i6.23311)

Abstract

In Indonesia, da'wah in the political and cultural spheres is compared to siblings who have not spoken to one another in a long time, contradicting one another and even bringing one another down. Reconstruction of da'wah in Indonesia's political and cultural realms is an extremely interesting subject that has the potential to constantly evolve and present new breakthroughs. Legislation and public policy issues require these individuals to engage in the political process, whereas social-social issues typically require a cultural approach. The purpose of this study is to determine whether it is true that Islamic da'wah in the political and cultural realms cannot coexist, particularly in the Indonesian context, and whether it is possible to create synergy – even convergence – between political and cultural da'wah, as well as what compromises must be made with mainstream circles. Today, political and cultural da'wah circles exist in Indonesia. By utilizing a literature-based approach that incorporates both theory and expert opinion. Additionally, it is analyzed by providing interpretations that are transformed into objects that can be interpreted in terms of space and time. The article concludes that, in contemporary Indonesia, the synergy between political and cultural da'wah must be directed toward resolving the nation's problems, such as poverty and ignorance eradication, upholding justice, and establishing a clean government. These efforts should be couched in a framework of noble morality, elegant strategy, and an approach that is both friendly and sympathetic.

Keywords: Reconstruction; Islamic Education; Politics, Culture

Abstrak

Dakwah di ranah politik dan kultural di Indonesia digambarkan seolah-olah sebagai *siblings* yang sudah lama tidak saling menyapa, kontradiktif, bahkan saling menjatuhkan. Rekonstruksi dakwah di ranah politik dan kultural di Indonesia merupakan topik yang sangat menarik dan memiliki potensi kuat untuk selalu berkembang serta menghadirkan terobosan baru. Persoalan perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan publik mengharuskan umat ini untuk terlibat di arena politik, sementara persoalan sosial-kemasyarakatan cenderung menghajatkan pendekatan kultural. Penelitian ini hendak menjawab pertanyaan, benarkah dakwah Islam di ranah politik dan di ranah kultural tidak bisa dipertemukan, khususnya dalam konteks Indonesia dan mampukah menciptakan sinergi –bahkan konvergensi– antara dakwah politik dan dakwah kultural serta Apa saja kompromi-kompromi yang mesti ditempuh dari *mainstream* kalangan dakwah politik dan kalangan dakwah kultural yang ada

*Received: Nov 13, 2021, Revision: Nov 25, 2021, Published: December 22, 2021.

¹ **Abdullah Hakam Shah** adalah dosen Universitas Al Azhar Indonesia (UIA) Jakarta. Email: ahakamshah@gmail.com.

di Indonesia sekarang. Dengan menggunakan pendekatan literatur yang mempertimbangkan teori serta pendapat para ahli. Selanjutnya dianalisis dengan cara memberikan interpretasi yang menjadi obyek untuk ditafsirkan dalam konteks ruang dan waktu. Artikel ini menemukan bahwa dalam konteks Indonesia kontemporer, sinergi antara dakwah politik dan dakwah kultural tersebut mesti diarahkan untuk menyelesaikan problematika bangsa seperti pengentasan kemiskinan dan kebodohan, penegakan keadilan, serta pembentukan pemerintahan yang bersih. Upaya-upaya ini hendaknya dikemas dalam bingkai moralitas yang luhur, strategi yang elegan, serta cara pendekatan yang ramah dan simpatik.

Keywords: Rekonstruksi; Dakwah Islam; Politik, Kultural

A. PENDAHULUAN

Dalam dinamika panjang dakwah Islam di Indonesia, tarik-menarik antara kalangan yang bergerak di ranah politik dengan kalangan di ranah kultural sering dijustifikasi sebagai dua kutub yang berseberangan. Mayoritas intelektual dan aktifis muslim pun seperti sangat sulit terlepas dari kungkungan asumsi klasik bahwa kedua model gerakan dakwah ini memang tak mungkin dipertemukan. Dakwah di ranah politik dan kultural di Indonesia digambarkan seolah-olah sebagai *siblings* yang sudah lama tidak saling menyapa, kontradiktif, bahkan saling menjatuhkan. Sehingga, akibatnya, pemikiran dan analisa seputar rekonstruksi dakwah di ranah politik dan kultural terjebak dalam situasi stagnan, disarkulatif, dan tak mampu mencetuskan terobosan-terobosan yang lebih baru.

Padahal, hakikatnya, rekonstruksi dakwah di ranah politik dan kultural di Indonesia merupakan topik yang sangat menarik dan memiliki potensi kuat untuk selalu berkembang serta menghadirkan terobosan baru. Paling tidak hal tersebut karena dua faktor: *pertama*, umat Islam di Indonesia tidak akan pernah bisa dipisahkan dari tuntutan-tuntutan politik dan kultural secara bersamaan. Sejak dahulu, umat ini senantiasa bergumul dengan persoalan-persoalan politik dan kultural. Persoalan perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan publik mengharuskan umat ini untuk terlibat di arena politik, sementara persoalan sosial-kemasyarakatan cenderung menghajatkan pendekatan kultural.

Kedua, kelompok-kelompok dalam tubuh umat Islam Indonesia sendiri tampak memiliki cara pendekatan yang variatif dalam menyelesaikan setiap persoalan politik, sosial, ekonomi dan budaya yang dihadapinya. Sebagian lebih menggunakan pendekatan politik murni, sebagian bersikukuh mengedepankan pendekatan kultural sepenuhnya, sebagian cenderung memilih pendekatan semi-politis, semi-kultural, dan seterusnya.² Masing-masing secara dinamis melakukan eksperimen cara pendekatan sesuai ijtihadnya. Dalam konteks seperti ini, peluang untuk melakukan rekonstruksi

² Kenyataan cara pendekatan yang variatif dan plural ini diingkari oleh mayoritas orientalis dan media Barat. Karena dalam bayangan mereka, sebagaimana diungkapkan Mohammed Arkoun, Islam hanya satu bentuk saja. Yaitu: Islam politik yang fundamentalis, menebarkan permusuhan, dan bercita-cita membebaskan dunia dari dominasi Barat berikut gaya hidup mereka yang materialistis. Lihat Arkoun, Mohammed. 1994. *Rethinking Islam: Common Questions, Uncommon Answers*. Colorado & Oxford: Westview Press. hal. 7

dakwah Islam antara ranah politik dan ranah kultural — di luar asumsi klasik tersebut di atas—menjadi sangat terbuka.

Tetapi menemukan model relasi lain tersebut tentu bukan hal yang mudah. Setidaknya terdapat dua pertanyaan penting dan mendasar yang mesti dijawab. *Satu*, benarkah dakwah Islam di ranah politik dan di ranah kultural tidak bisa dipertemukan, khususnya dalam konteks Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan ini, tidak bisa gegabah menilai dari sebatas fakta relasi kalangan dakwah politik *vis a vis* kalangan kultural yang terjadi belakangan ini. Tetapi lebih jauh lagi, kita perlu melacak akarnya lewat sebuah kajian historis.

Dua, mampukah menciptakan sinergi –bahkan konvergensi—antara dakwah politik dan dakwah kultural? Apa saja kompromi-kompromi yang mesti ditempuh dari *mainstream* kalangan dakwah politik dan kalangan dakwah kultural yang ada di Indonesia sekarang? Penelitian ini mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut lewat beberapa fakta dan argumen.

Literature Review

Definisi Dakwah Politik dan Dakwah Kultural

Berdakwah merupakan perintah agama Islam yang tertuang dalam Al-Qur'an. Kaidah amar ma'ruf nahi munkar harus berjalan dengan semestinya. Memerintahkan berbuat baik dengan cara yang baik, demikian juga mencegah kemungkaran juga harus dengan kebaikan. Dalam bahasa Arab dakwah yang berarti memanggil, menyeru dan mengundang. Dari sisi terminologi, dakwah adalah upaya mengajak atau menyeru umat manusia agar berada di jalan Allah, baik melalui kegiatan lisan dan tulisan atau perbuatan.³

Hakikat dari dakwah ialah mengembalikan fitrah manusia kepada asal kejadiannya, sebab Islam diturunkan sesuai dengan fitrah manusia, membimbing fitrah yang menyimpang. Dakwah Islam tidak hanya dipahami secara tekstual saja namun juga dipahami secara kontekstual. Dakwah Islam melibatkan proses transformasi yang memang tidak terjadi begitu saja, tetapi membutuhkan kesadaran dari masyarakat untuk merubah situasi dan kondisi umat menuju kemaslahatan.⁴

Menurut Sulthon, dakwah kultural adalah aktivitas dakwah yang menekankan pendekatan Islam kultural. Islam kultural adalah salah satu pendekatan yang berusaha meninjau kembali kaitan doktrinal yang formal antara Islam dan politik atau Islam dan negara. Adapun menurut Fahrurrozi, Model dakwah kultural, yaitu dakwah Islamiyah yang dibangun berdasarkan sudut pandang kebudayaan dalam memahami Islam.⁵

³ Muhiddin, *Dakwah Dalam Perspektif Al-Quran*, Bandung: Pustaka Setia 2002, h. 19

⁴ Adnan, M & Uyuni, B. Maqashid Sharia in Millennial Da'wah. *SALAM Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050 Vol. 8 No. 5 (2021), pp.1483-1498 DOI: 10.15408/sjsbs.v8i5.22736 <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index> 1483

⁵ Sulthon, Muhammad. *Menjawab Tantangan Zaman Desain Ilmu Dakwah Kajian Ontologis, Epistemologis, dan Aksiologis*, Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003; Setyawan, Agus. *Dakwah yang*

Bungo menyebutkan bahwa, dakwah kultural di satu sisi mempunyai prinsip dengan lebih menekankan pendekatan Islam kultural. Gerakan dakwah kultural itu cenderung mempertanyakan kebenaran statemen yang mengatakan bahwa gerakan dakwah dipandang belum sungguh-sungguh memperjuangkan Islam, ketika belum secara terus-menerus memperjuangkan negara-negara berdasarkan syariat Islam. Islam kultural adalah salah satu pendekatan yang berusaha meninjau kembali kaitan doktrinal yang formal antara Islam dan politik atau Islam dan negara.⁶

Dalam dakwah kultural, fokus diarahkan pada metode dialog sehingga tercipta harmoni antara nilai agama dan nilai budaya lokal. Pendidikan yang berkarakter dan berwawasan lokal, nasional maupun universal, dimensi olah raga dan kesehatan, baik jasmani maupun rohani, dimensi adat/budaya dengan prinsip bersandar pada adat dan bersendikan sara', dimensi perdagangan yang adil dan jujur, industri yang ramah lingkungan dan pariwisata.⁷

Menurut Nirwan, dakwah di bidang politik adalah ajakan mengembalikan tata cara pengurusan masyarakat ke dalam suasana yang Islami. Politik yang digunakan para da'i atau para ulama tentunya bukanlah politik yang menghalalkan semua cara, di mana kekuasaan sebagai tujuan. Dakwah politik haruslah memiliki orientasi keislaman yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat secara keseluruhan. Politik hanyalah salah satu media dalam berdakwah. Para da'i atau aktivis dakwah yang memasuki ranah politik harus dapat menjadi wakil rakyat sekaligus da'i yang menyampaikan kebenaran untuk dijadikan acuan bagi anak bangsa.⁸

Mastori mengungkapkan, Setidaknya ada beberapa pemikiran atau sikap umat Islam di Indonesia dalam menyikapi dakwah politik yaitu; Pertama, kelompok *pragmatism* oportunistis yaitu elit politik yang menjadikan dakwah sebagai kendaraan untuk mendapatkan kekuasaan. Kedua, kelompok formalis yang mendukung perda-perda syariah. Ketiga, kelompok dakwah ideologis yang memperjuangkan Islam sebagai dasar negara.⁹

B. METODE PENELITIAN

Kajian dalam artikel ini menggunakan model penelitian kualitatif dengan teknik *library research*. Peneliti menggunakan metode penelitian Kualitatif, baik normatif maupun dengan perbandingan dengan fakta lapangan. Pendekatan ini dilakukan

Menyelamatkan Memaknai Ulang Hakikat dan Tujuan Da'wah Islamiyah. Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan dan Keagamaan. Vol.15No.02Juli-Desember2020| 189-199

⁶ Bungo, S. Pendekatan Dakwah Kultural Dalam Masyarakat Plural, Jurnal Dakwah Tabligh, Vol. 15, No. 2, Desember 2014: 209 – 219. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/tabligh/article/view/349>

⁷ Syahrudin, kontribusi dakwah structural dan kultural dalam pembangunan kota Palopo. Lentera, Vol. IV, No. 1, Juni 2020.

⁸ Nirwana, Andi, Substantia, Volume 18 Nomor 2, Oktober 2016. AKULTURASI POLITIK DALAM DUNIA DAKWAH.

⁹ Mastori: Dialektika Pemikiran Dakwah Politik di Indonesia, Jurnal Dakwah, Vol. 20, No. 1 Tahun 2019.

peneliti dengan menggunakan pendekatan literatur dengan mempertimbangkan teori serta pendapat para ahli. Selanjutnya dianalisis dengan model analisis, artinya peneliti mencoba mencari makna dan merumuskannya dengan cara memberikan interpretasi teks yang menjadi obyek untuk ditafsirkan dalam konteks ruang dan waktu. Pertanyaan yang ingin dijawab pada penelitian ini ialah benarkah dakwah Islam di ranah politik dan di ranah kultural tidak bisa dipertemukan, khususnya dalam konteks Indonesia? Dan mampukah menciptakan sinergi –bahkan konvergensi— antara dakwah politik dan dakwah kultural? Apa saja kompromi-kompromi yang mesti ditempuh dari *mainstream* kalangan dakwah politik dan kalangan dakwah kultural yang ada di Indonesia sekarang?

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Pertemuan Dakwah Politik dan Dakwah Kultural: Perspektif Historis

Penyebaran Islam di Indonesia bisa dibilang cukup khas, terutama bila dibanding penyebaran Islam di negara-negara atau kawasan lain. Di Timur-Tengah, Afrika, atau Spanyol –misalnya, penyebaran Islam dilakukan melalui dua jalur: ekspansi dan ekspedisi. Atau dengan kata lain, lewat jalur dakwah politik dan dakwah kultural. Tetapi di Indonesia, setidaknya hingga dua abad pertama, Islam sepenuhnya tersebar lewat jalur kultural. Mula-mula adalah para pedagang dari tanah Gujarat dan Arab yang memperkenalkan Islam ke wilayah Nusantara, di sela-sela aktifitas niaga mereka. Kemudian melalui proses asimilasi budaya, secara perlahan mereka menarik penduduk pribumi (terutama di daerah pesisir Sumatra, Jawa bagian utara, dan Sulawesi) untuk mengenal dan memeluk agama Islam.

Penyebaran agama Islam secara kultural ini tampak semakin massif, khususnya di pulau Jawa, berkat peranan keturunan atau murid-murid para penebar Islam generasi pertama tersebut. Dan dari awal abad ke-15 hingga pertengahan abad ke-16 M., penyebaran Islam secara kultural seperti menemukan zaman keemasannya lewat tangan sembilan orang Sunan yang biasa dikenal dengan sebutan *Walisongo*. Para Sunan ini tidak hanya mengambil peranan sebagai dai atau pemimpin religius semata, tetapi juga menjadi pembaharu sosial pada masanya. Mereka secara evolusif membenahi tatanan masyarakat yang masih kental bercorak animisme-dinamisme dengan memperkenalkan peradaban baru yang bernuansa Islam; meliputi bidang pendidikan, tata niaga, kesenian, bahkan tata pemerintahan. Begitu besarnya pengaruh penyebaran Islam secara kultural yang dilakukan oleh para Sunan tersebut, sampai-sampai banyak kalangan yang menganggap bahwa dakwah kultural inilah model gerakan keislaman yang khas Indonesia. Sementara model gerakan keislaman lain, seperti dakwah di ranah politik, dianggap ‘barang impor’ yang dijejalkan dari kawasan Arab, Asia Tengah, Asia Selatan, dan sebagainya.

Padahal, jika kita menelaah sejarah penyebaran Islam di Indonesia dengan cermat, akan ditemukan bahwa dakwah di ranah politik juga memiliki akar yang kuat. Dakwah politik bukanlah ‘barang impor’ yang baru didatangkan dari kawasan Arab –

misalnya—sejak awal abad ke-19 M.¹⁰ Kalaulah Islam kultural ditengarai marak dan menemukan zaman keemasannya di era *Walisongo*, maka dakwah politik pun telah muncul di masa yang sama. Dan sejak era *Walisongo* itu pulalah sebenarnya persentuhan, dialektika, serta pertemuan antara dakwah di ranah politik dan di ranah kultural dijalin secara intens.

Ada beberapa fakta penting yang bisa dikemukakan untuk memperkuat hipotesa ini. Sebutlah sebagai misal: pada akhir abad ke-15 M., tak lama setelah runtuhnya Kerajaan Majapahit, *Walisongo* memainkan kiprah politik yang tidak kecil dalam proses berdirinya Kerajaan Demak yang kemudian menjadi kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Kiprah politik ini tidak hanya dimanifestasikan dalam bentuk dukungan atau restu kepada Raden Patah belaka, akan tetapi juga berupa kesediaan untuk duduk di dewan penasehat kerajaan yang diberi nama “Majelis *Walisongo*”.¹¹

Kiprah politik *Walisongo* tersebut menemukan puncaknya pada diri Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah (hidup antara tahun 1448-1568 M.). Menyusul berdirinya Kerajaan Demak, cucu raja Padjajaran ini mendirikan Kasultanan Cirebon atau Kasultanan Pakungwati, dan sekaligus menjadi pemimpin pemerintahan pertama di sana. Kemudian bersama putranya, Maulana Hasanudin, beliau merambah daerah Banten dan membangun struktur pemerintahan yang selanjutnya menjadi cikal-bakal Kasultanan Banten.¹² Dari fakta-fakta di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dialektika serta pertemuan antara dakwah di ranah politik dan dakwah di ranah kultural telah lama terjalin intens dalam sejarah Indonesia. Bahkan pada abad-abad awal penyebaran Islam di Nusantara!

Dialektika dan pertemuan ini terus berlanjut pasca kemerdekaan Republik Indonesia. Sekalipun, barangkali, dalam bentuk serta intensitas yang berbeda. Seiring dengan melembaganya gerakan-gerakan politik menjadi institusi-institusi politik formal, polarisasi dakwah politik dan dakwah kultural di Indonesia memang sering terasa tajam. Seakan-akan ada jurang pemisah yang membentang di antara keduanya. Tetapi jurang pemisah ini hakikatnya tidak pernah mampu memisahkan gairah pertemuan antara dakwah politik dan dakwah kultural.

Secara kategoris, pertemuan dakwah politik dan dakwah kultural di Indonesia pasca kemerdekaan terjadi di dua level. **Pertama**, di level legal-formal. Hal ini misalnya ditandai oleh terjunnya NU ke pentas politik dan resmi menjadi partai politik sejak Pemilu 1955 sampai tahun 1973. Bagi sebagian *Nahdliyin*, peristiwa ini dianggap sebagai kecerobohan historis karena telah menyalahi khittah 1926 yang membatasi NU –sebagai gerakan kultural – untuk terlibat langsung di pentas politik praktis. Akan tetapi, di sisi

¹⁰ Penulis memilih kisaran awal abad ke-19 M. di sini karena gerakan revivalisme Islam (*harakat al-Nahdlah al-Islamiyah*), yang dipercaya sebagai genderang maraknya Islam politik di berbagai kawasan Islam, secara spesifik dimulai tahun 1805 M.

¹¹ Lihat Susilo, Agus, and Ratna Wulansari. 2019. “Peran Raden Fatah Dalam Islamisasi Di Kesultanan Demak Tahun 1478–1518.” TAMADDUN: Jurnal Kebudayaan Dan Sastra Islam 19(1):70–83. doi: 10.19109/tamaddun.v19i1.3401

¹² Lihat Maftuh. 2015. *Islam pada Masa Kasultanan Banten*. Jurnal Al Qalam, UIN Banten, Vol. 32, 2015. hal 84-85

lain, peristiwa ini justru merupakan deskripsi yang sangat gamblang tentang romantika pertemuan dakwah di ranah politik dan dakwah di ranah kultural.

Di era reformasi saat ini, pertemuan Islam politik dan Islam kultural di Indonesia kembali terulang. Bertubi-tubi serta dalam intensitas yang sangat variatif. Sekalipun artikulasi dan faktor yang mendorongnya tidak sama persis dengan apa yang terjadi di pertengahan 1950-an, fenomena Partaai Keadilan Sejahtera (PKS) mungkin bisa dijadikan sebagai sampel yang paling menarik. PKS adalah artikulasi dakwah politik yang lahir dari gerakan dakwah kultural yang biasa disebut *Usrah*. Bermula dari kegiatan diskusi dan pengajian di masjid-masjid kampus sejak tahun 1980-an, artikulasi politik *ala Usrah* ini kemudian terbukti menjadi *rising star* sejak Pemilu 2004 lalu.

Kedua, di level informal. Pertemuan dakwah politik dan dakwah kultural di level informal marak terjadi pada masa Orde Baru, terutama sejak diberlakukannya kebijakan pemerintah soal fusi partai-partai politik. Kebijakan politik Orde Baru yang represif, dengan membungkam akselerasi kelompok-kelompok yang masih melihat Islam secara ideologis dan politis, berdampak langsung pada miskinnya pertemuan Islam politik dan Islam kultural di level legal-formal. Maka seakan-akan pilihan yang tersisa hanyalah pertemuan di level informal. Hal ini ditandai oleh ramainya fenomena dukungan, doa politik, dan restu-merestui dalam penyelenggaraan pemilu atau pencalonan presiden.

Di era reformasi sekarang, sekalipun dengan latar belakang dan motif yang berbeda, pertemuan dakwah politik dan dakwah kultural di level informal agaknya terus berlanjut. Rekomendasi Muhammadiyah untuk memenangkan Amien Rais pada Pilpres 2004, KH. Hasyim Muzadi yang menjadi Cawapres Megawati, tokoh-tokoh berbagai ormas menjadi anggota DPR-DPRD, sampai KH. Ma'ruf Amin yang masih menjabat Rais Aam PBNU dipinang sebagai Cawapres Joko Widodo dan kemudian memenangkan kontestasi Pilpres 2019, merupakan contoh-contoh gamblang dari pertemuan dakwah politik dan dakwah kultural yang terlalu susah untuk dipungkiri.

2. Agenda-agenda Sinergi Dakwah Politik dan Dakwah Kultural

Sekalipun pertemuan antara dakwah di ranah politik dan dakwah di ranah kultural terbukti telah terjalin intens dalam beberapa fase dinamika Islam di Indonesia, tetapi mensinergikan keduanya dalam konteks Indonesia kontemporer tetaplah bukan pekerjaan yang ringan. Karena, sebagaimana disinyalir Robert D. Lee: "Benturan antara identitas-identitas kultural dan tatanan politik cenderung terjadi lebih tajam di negara-negara dunia ketiga –termasuk di sebagian besar negara-negara muslim."¹³

Namun bila diperhatikan secara seksama, masing-masing dari Islam politik dan Islam kultural sebenarnya memiliki plus-minus, saling mengisi, serta saling melengkapi. Dengan kata lain, dalam dinamika Islam di Indonesia, gerakan-gerakan Islam politik yang dominan bisa dibilang tidak seratus persen lahir dari entitas politik ataupun

¹³ Lee, Robert D., pengantar penerjemah dan editor "*Rethinking Islam: Common Questions, Uncommon Answers*", *op. cit.*, hal. ix

berakselerasi di ranah politik murni. Begitu pula, gerakan Islam kultural yang dominan pun tak pernah benar-benar ‘mengharamkan’ wilayah politik.

Fenomena tersebut bisa kita lihat dengan jelas dari beberapa sampel gerakan Islam politik yang sukses, semisal: Masyumi, PKS, PKB dan seterusnya. Pada setiap masanya, gerakan-gerakan tersebut tidak hanya berorientasi politik semata, tapi juga menaruh perhatian dan bergerak efektif dalam dakwah kultural. Demikian pula dengan personifikasi gerakan Islam kultural yang sukses, seperti: NU, Muhammadiyah, Persis, dan seterusnya. Selain berkonsentrasi melakukan dakwah kultural, gerakan-gerakan ini diakui telah menyumbangkan kontribusi cukup besar dalam proses pendidikan politik rakyat.

Pada titik singgung seperti itulah, peluang untuk mewujudkan sinergi dakwah politik dan dakwah kultural di Indonesia tampak terbuka lebar. Yang dibutuhkan adalah bagaimana menumbuhkan kompromi-kompromi dari kecenderungan ‘saling tidak menyapa’ yang acapkali terlihat di kedua belah kubu. Paling tidak, ada empat agenda yang mesti dilakukan dalam rangka kompromi ini.

Pertama, di ranah dakwah politik, politik yang dikembangkan tidak boleh berorientasi pada kekuasaan, tapi politik yang berpihak pada rakyat luas. Sebab bila sampai terjebak dalam perebutan kekuasaan, maka gerakan ini telah menebarkan virus dalam tubuhnya sendiri dan berpotensi besar akan gagal menjawab tantangan zaman. Oleh karena itu, agenda-agenda seperti pengentasan kemiskinan dan pengangguran, pemberdayaan usaha kecil, serta pemerataan kesempatan untuk mengenyam pendidikan yang layak¹⁴ harus diletakkan sebagai prioritas utama; jauh di atas ambisi untuk memperoleh “kue” kekuasaan. Politik keberpihakan kepada rakyat luas ini mesti dimanifestasikan lewat berbagai perpanjangan kekuatan dakwah politik, baik yang berada di parlemen maupun di jajaran eksekutif, agar undang-undang dan kebijakan yang lahir dari koridor politik benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Orientasi semacam ini, pada gilirannya, akan lebih dapat berjalan beriringan dengan agenda-agenda yang dikembangkan oleh gerakan dakwah di ranah kultural –yang memang berkonsentrasi membangun kesadaran dan kesejahteraan rakyat.

Kedua, dakwah politik perlu beralih dari kebiasaan mengedepankan jargon dan simbol dengan mulai menekankan substansi. Selama ini, mayoritas gerakan Islam politik seringkali terjebak dalam kubangan jargon dan simbol. Sebutlah sebagai misal: jargon partai Islam, jargon pembentukan negara Islam, simbol Kakbah yang sakral, dan seterusnya. Pada masa-masa tertentu, jargon-jargon dan simbol tersebut memang pernah menebarkan daya magisnya di tengah-tengah rakyat luas. Tetapi ketika rakyat semakin cerdas dan kritis, secara perlahan daya magis itu mulai terkikis dan perlahan pudar.

Dalam pemilu legislatif 2019 lalu, fenomena merosotnya perolehan suara partai-partai Islam yang hanya ‘menjual’ jargon dan simbol, serta kurang menunjukkan perhatian serius terhadap substansi, seharusnya bisa dibaca sebagai *warning* bahwa

¹⁴ Kekhawatiran akan gagalnya Islam politik dalam memperjuangkan agenda-agenda semacam ini banyak disuarakan oleh para Islamis semisal John L. Esposito. Lihat Esposito, John L. 2002. *What Everyone Needs to Know About Islam*. New York: Oxford University Press. hal. 60

'menjual' jargon dan simbol saja tidak cukup. Saat ini, rakyat lebih tertarik pada komitmen riil partai untuk menyelesaikan problematika-problematika bangsa. Oleh karena itu, kalangan pegiat dakwah di ranah politik perlu mengapresiasi agenda-agenda kebangsaan seperti upaya memperjuangkan keadilan, membentuk pemerintahan yang bersih, serta penegakan supremasi hukum sebagai bagian penting dari upaya *tathbiq al-syari'at*, yang tak kalah pentingnya dari praktik *jinayah*, formalisasi hukum Islam, dan lain-lain. Dalam realitas politik Indonesia dewasa ini, meroketnya perolehan suara PKS dalam pemilu 5 April 2004 agaknya bukan cuma disebabkan oleh simbol keislaman yang diusung, tetapi juga oleh kesungguhan PKS dalam memperjuangkan hal-hal substansial seperti agenda-agenda kebangsaan tersebut di atas.

Ketika Islam politik mulai menekankan substansi, dan tidak semata-mata terpaku pada jargon atau simbol, maka peluang untuk membangun sinergi antara Islam politik dan Islam kultural tampaknya akan semakin menguat dan dekat dari hari ke hari.

Ketiga, dakwah politik harus bisa membumikan etika dan moralitas politik yang luhur. Di antara tantangan besar dakwah politik selama ini adalah menghilangkan sekumpulan stigma tentang artikulasi keislaman yang keras dan tidak mengundang simpati. Meminjam bahasa Arkoun, terlepas kuatnya faktor eksternal, yang mengemuka adalah citra yang paradoks: bagaimana mungkin Islam sebagai agama yang begitu mengagungkan aspek transendental ternyata justru melahirkan artikulasi politik yang galak!¹⁵

Padahal, perlu disadari bahwa artikulasi yang tidak simpatik dan semata berorientasi pada kekuasaan justru akan merugikan masa depan dakwah politik itu sendiri. Karena, memang, siapapun bakal lebih tertarik pada artikulasi yang ramah, tidak menghalalkan segala cara dan santun, daripada artikulasi yang tidak simpatik. Sementara di tingkat praksis, artikulasi Dakwah politik yang simpatik dan menjunjung moralitas dapat dipastikan akan lebih seiring-sejalan dengan pola pendekatan yang dikembangkan oleh di ranah kultural.

Keempat, di kalangan pegiat dakwah kultural, gerakan yang dikembangkan mesti diarahkan untuk juga memainkan fungsi sebagai kekuatan pengontrol dan penyeimbang (*check and balance*). Karena sampai saat ini, Islam kultural diakui masih mengantongi modal akseptabilitas sosial dan historis yang sangat kuat di tengah-tengah rakyat. Modal akseptabilitas sosial dan historis tersebut tidak hanya bisa membuatnya leluasa melakukan dakwah kultural, tapi juga bisa dijadikan sebagai kekuatan yang efektif guna ikut mewujudkan tatanan politik yang sehat serta pemerintahan yang bersih.

¹⁵ Arkoun, Mohammed, *op. cit.*, hal. 114

D. KESIMPULAN

Dari beberapa fakta serta argumen yang telah dipaparkan di atas, asumsi klasik yang mengatakan bahwa dakwah di ranah politik dan di ranah kultural tidak bisa dipertemukan agaknya terlalu banyak mengandung kelemahan argumen dan celah kritik. Karena, memang, sejarah panjang dinamika Islam di Indonesia menunjukkan betapa kental serta romantisnya pertemuan antara dakwah politik dan dakwah kultural.

Para aktifis muslim dari kedua model gerakan keislaman ini sudah semestinya keluar dari kungkungan paradigma yang konfrontatif menuju paradigma yang kooperatif dan sinergis. Karena, sejatinya, masa-masa terbaik yang pernah dimiliki oleh umat Islam di Indonesia selalu terwujud ketika dakwah politik dan dakwah kultural mau melakukan kompromi, saling melengkapi, serta bersinergi.

Dalam konteks Indonesia kontemporer, sinergi antara dakwah politik dan dakwah kultural tersebut mesti diarahkan untuk menyelesaikan problematika-problematika bangsa seperti pengentasan kemiskinan dan kebodohan, penegakan keadilan, serta pembentukan pemerintahan yang bersih. Upaya-upaya ini hendaknya dikemas dalam bingkai moralitas yang luhur, strategi yang elegan, serta cara pendekatan yang ramah dan simpatik.

Apabila hal tersebut bisa direalisasikan, maka apa yang dideskripsikan oleh Graham E. Fuller dan Ian O. Lesser bukan sekadar utopia belaka, bahwa, "Di dunia muslim kontemporer, gerakan-gerakan keislaman pada umumnya menikmati legitimasi lebih besar di mata publik dan memiliki dukungan akar rumput lebih kuat dibanding gerakan-gerakan/partai lain."¹⁶

Umat Islam Indonesia memang layak berharap banyak dari sinergi kedua model gerakan dakwah ini. Karena sinergi antara dakwah di ranah politik dan dakwah di ranah kultural di Indonesia akan berarti berpadunya gerakan struktural dan kultural, berpadunya kebijakan dari atas dan gerakan dari bawah, demi mewujudkan Negara-Bangsa Indonesia yang berkeadilan, bermartabat, demokratis, dan sejahtera.

REFERENSI

- Arkoun, Mohammed. (1994). *Rethinking Islam: Common Questions, Uncommon Answers*. Colorado & Oxford: Westview Press.
- Esposito, John L. (2002). *What Everyone Needs to Know About Islam*. New York: Oxford University Press.
- Fuller, Graham E., dan Lesser, Ian O. (1996). *A Sense of Siege: The Geopolitics of Islam and the West*. Lahore: Vanguard Books Pvt. Ltd.
- Lee, Robert D., pengantar penerjemah dan editor "Rethinking Islam: Common Questions, Uncommon Answers", *op. cit.*, hal. Ix

¹⁶ Fuller, Graham E., dan Lesser, Ian O. 1996. *A Sense of Siege: The Geopolitics of Islam and the West*. Lahore: Vanguard Books Pvt. Ltd. hal. 166

- Muhiddin, (2002) *Dakwah Dalam Perspektif Al-Quran*, Bandung: Pustaka Setia.
- Sulthon, Muhammad. (2003). *Menjawab Tantangan Zaman Desain Ilmu Dakwah Kajian Ontologis, Epistemologis, dan Aksiologis*, Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Adnan, M. Uyuni, B. (2021). Maqashid Sharia in Millennial Da'wah. *SALAM Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050 Vol. 8 No. 5 (2021), pp.1483-1498 DOI: 10.15408/sjsbs.v8i5.22736 <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index/1483>
- Bungo, S. (2014). Pendekatan Dakwah Kultural Dalam Masyarakat Plural. *Jurnal Dakwah Tabligh*, Vol. 15, No. 2, Desember 2014: 209-219. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/tabligh/article/view/349>
- Mastori (2019). Dialektika Pemikiran Dakwah Politik di Indonesia, *Jurnal Dakwah*, Vol. 20, No.1
- Maftuh (2015) *Islam pada Masa Kasultanan Banten*. *Jurnal Al Qalam*, UIN Banten, Vol. 32, 2015. hal 84-85.
- Nirwana, Andi. AKULTURASI POLITIK DALAM DUNIA DAKWAH. *Substantia*, Volume 18 Nomor 2, Oktober 2016.
- Setyawan, Agus. Dakwah yang Menyelamatkan: Memaknai Ulang Hakikat dan Tujuan Da'wah Islamiyah. *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan dan Keagamaan*. Vol.15No.02Juli-Desember 2020|189-199
- Syahrudin, kontribusi dakwah structural dan kultural dalam pembangunan kota Palopo. *Lentera*, Vol. IV, No. 1, Juni 2020
- Susilo, Agus, and Ratna Wulansari. 2019. "Peran Raden Fatah Dalam Islamisasi Di Kesultanan Demak Tahun 1478–1518." *TAMADDUN: Jurnal Kebudayaan Dan Sastra Islam* 19(1):70–83. doi: 10.19109/tamaddun.v19i1.3401

